

Fenomena Kepemimpinan Karismatis di Era Transisi Menuju Demokrasi Pasca Reformasi

The Phenomenon of Charismatic Leadership In the Transitional Era towards Post-Reform Democracy

Budhy Prianto

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Merdeka Malang

Email: budhy.prianto@unmer.ac.id

Abstrak

Meskipun sudah tergolong teori klasik, tiga tipologi otoritas Max Weber, yakni otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal rasional masih dipandang relevan dan diacu oleh para akademisi untuk berbagai keperluan ilmiah. Juga dalam praktek sosial politik keseharian di masyarakat Indonesia dewasa ini fenomena hidupnya tiga tipologi otoritas tersebut dapat ditemukan. Secara berbarengan tiga tipologi otoritas itu bisa ditemukan di tataran masyarakat, tataran negara, maupun dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Namun di era *democratic governance* dewasa ini penggunaan dan penerimaan tiga tipe otoritas itu tidak bisa dihindarkan dari kritik dan pro-kontra, utamanya yang terkait dengan otoritas karismatik. Terdapat kecenderungan berkembangnya –atau dikembangkannya– kembali kepemimpinan karismatik, amat terasa pada tahun-tahun terakhir ini. Banyak pemimpin dan figur yang merasa dirinya pemimpin sengaja melengkapi dirinya dengan aura mitis (*mythe*), mistis (*mystic*) agar terdongkrak otoritas karismatis personalnya guna melegitimasi kekuasaan dan pengaruhnya. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis isi, tulisan ini hendak mencoba menemukan jawaban, bagaimana mengelola kecenderungan tipe kepemimpinan karismatis agar bisa selaras dengan nilai-nilai *democratic governance* yang dewasa ini sedang berkembang. Hasil penelitian memperlihatkan adanya dua cara untuk mensinergikan otoritas karismatik dengan tuntutan *democratic governance*. Di satu sisi melakukan proses demistifikasi karisma, dan di sisi yang lain terus mendorong dikembangkannya nilai demokrasi prosedural dan substansial.

Kata kunci: demistifikasi; demokrasi; karisma; kepemimpinan karismatik; otoritas

Abstract

Although Max Weber's three typologies of authority, namely traditional authority, charismatic authority, and rational-legal authority have been classified as a classical theory, they are still considered relevant and referred to by academics for various scientific purposes. Also in daily socio-political practices in Indonesian society today, the phenomenon of life can be found in three typologies of authority. Simultaneously, the three typologies of authority can be found at the community level, state level, and in the relationship between society and the state. However, in the current era of democratic governance, the use and acceptance of these three types of authority cannot be avoided from criticism and controversy, especially those related to charismatic authority. There is a tendency for the development –or redevelopment– of charismatic leadership to be felt in recent years. Many leaders and figures who feel that they are leaders deliberately equip themselves with a mythical aura, or mystical, in order to boost their personal charismatic authority, in order to legitimize their power and influence. By using literature research and content analysis, this paper tries to find answers on how to manage the

tendency of charismatic leadership types to be in line with democratic governance values that are currently being developed. The results of the study show that there are two ways to synergize charismatic authority with demands for democratic governance. On the one hand, carry out the process of demystifying charisma, and on the other hand, continue to encourage the development of procedural and substantial democratic values.

Keywords: charisma; charismatic leadership; demystification; democracy; authority

Pendahuluan

Pengamat politik Yudi Latif menilai negara ini masih mengalami “kekeringan berkepanjangan” dalam hal kepemimpinan (Yudi, 2010). Alhasil, katanya, angka-angka yang muncul pada pemilu presiden tahun 2014 hanyalah angka-angka “lama”. Hanya mereka yang memiliki kepemimpinan nasional yang dapat mengendalikan partai politik dan mempunyai modal besar. Akibatnya, perekrutan pemimpin nasional mengabaikan integritas dan kompetensi. Hanya mereka yang menguasai partai dan punya modal banyak yang bisa mendapat “tiket” menjadi pemimpin negara. Dengan sistem rekrutmen kepemimpinan seperti ini yang mengabaikan basis otoritatif, maka “kekeringan kepemimpinan” di negeri ini akan terus berlanjut. Fenomena ini di satu sisi menunjukkan bahwa aktivitas partai politik, khususnya fungsi rekrutmen pimpinan kurang baik. Di sisi lain, hal tersebut memperlihatkan bahwa pada umumnya bangunan kelembagaan partai politik di Indonesia secara kultural masih patrimonial (Romli, L., 2016). Partai politik masih bergantung pada tokoh panutan karismatik berdasarkan kepercayaan atau keturunan (Ridoi, 2016; Rozaki, 2021). Jika kita mencermati tren pertumbuhan – atau pengembangan kembali – kepemimpinan karismatik, hal ini sangat jelas terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pemimpin dan tokoh yang menganggap dirinya pemimpin dengan sengaja melengkapi dirinya dengan aura mistis, disertai segala sesuatu yang bernuansa keramat agar karismanya menguat untuk melegitimasi kekuasaan dan pengaruhnya. Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan mengapa kepemimpinan karismatik cenderung tetap bertahan sepanjang masa transisi menuju demokrasi pasca-reformasi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data dari berbagai bahan pustaka baik berupa buku, terbitan berkala, narasi, laporan, booklet, dan bahan terbitan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini adalah dengan melakukan kondensasi data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel yang terdapat dalam berbagai sumber data tersebut. Analisis isi digunakan sebagai alat analisis (Harwood & Garry, 2003; McNabb, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Kepemimpinan Karismatik

Secara etimologis, kata karisma berasal dari bahasa Yunani: *charisma*, yang berarti pemberian anugerah. Secara sosiologis, istilah tersebut telah digunakan sejak zaman Max Weber untuk menyatakan kemampuan memimpin dan menginspirasi orang lain, semata-mata

karena kekuatan keyakinan dari diri pribadi. Dan karenanya bersifat irasional (Mills & Horowitz, 1967; Shadily, 1992, p. 1671). Collin. P.H. (2004) mendefinisikan karisma sebagai “*the special quality of some public persons, showing charm or strength of character or attraction, that wins them public support*” dan karismatik sebagai “*showing the special quality which makes a leader popular*”. Yang lebih jelas lagi seperti dinyatakan oleh Koentjaraningrat (1980, p. 194) karisma adalah sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin yang dianggap keramat oleh masyarakat. Pemimpin tersebut bisa berupa seorang pemuka adat, pemuka agama atau pendeta. Ia dipatuhi, dihormati atau disegani oleh masyarakat karena dianggap sebagai simbol masyarakat yang sakral, yang menerima wahyu dari para leluhur, dewa atau Tuhan. Ia juga bisa berwujud seorang raja, karena sang raja sendiri adalah sosok keramat karena ia menjalankan imamatnya, atau karena ia dianggap sebagai penjelmaan para dewa.

Melalui pendekatan yang lebih kontemporer Pappas, T. S. (2011) mengkaji karisma sebagai sebuah istilah kekuasaan murni dengan memusatkan perhatian pada apa yang membuatnya mencuat dalam demokrasi politik biasa menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, yaitu, karisma yang sifatnya personal (dan bukan yang impersonal). Kemudian mewujud pada karakter kepemimpinan dan implementasi berbagai program yang radikal secara politik (bukan moderat). Oleh karena itu, karisma politik didefinisikan sebagai jenis kepemimpinan sah yang bersifat pribadi dan bertujuan untuk melakukan transformasi radikal terhadap tatanan kelembagaan yang sudah mapan. Pemahaman tentang karisma politik seperti itu bagi Pappas memungkinkan untuk menganalisis lebih jauh ciri-ciri inti kepemimpinan karismatik dan menyusun “indeks karismatis” yang siap untuk diteliti secara empiris komparatif. Jika digunakan kembali dalam ilmu politik, karisma mungkin akan menjadi sebuah konsep yang berguna dengan potensi analitis yang mengejutkan. Minat baru terhadap karisma politik diharapkan dapat memberikan petunjuk berharga dalam bidang penelitian penting seperti kepemimpinan politik, populisme, dan politik kontroversial.

Kepemimpinan menurut Koentjaraningrat (1980, p. 192) mensyaratkan adanya tiga faktor penting agar mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, yaitu: (1) kekuasaan, atau *power*; (2) kewenangan, atau *authority*; dan (3) popularitas. Dua faktor pertama sering kali dianggap oleh banyak orang sebagai faktor paling penting bagi seorang pemimpin. Namun yang jelas tanpa adanya faktor ketiga yang sejatinya merupakan faktor dominan bagi seorang pemimpin agar memiliki banyak pengikut, ia tidak dapat menjalankan peran kepemimpinannya secara akurat dan konsisten. Dalam konteks sosiologi, hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin bersifat asimetris. Artinya, sang pemimpin sebagai pihak pertama dapat memberikan pengaruh yang relatif lebih besar terhadap yang dipimpin sebagai pihak kedua, sehingga yang dipimpin sebagai pihak kedua tidak dapat memberikan pengaruh dengan efek yang sama terhadap sang pemimpin sebagai pihak pertama. Efek pengaruh yang lebih besar dapat dicapai melalui beberapa dari tujuh karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. Karakter tersebut diantaranya adalah:

- 1) Karakter yang disukai oleh anggota masyarakat pada umumnya;

- 2) Karakter yang menjadi idola banyak anggota masyarakat dan oleh karena itu suka ditiru;
- 3) Keahlian yang dibutuhkan dan diakui oleh anggota masyarakat;
- 4) Pengabsahan legal atau legitimasi, sejalan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh adat istiadat masyarakat yang bersangkutan;
- 5) Sifat sakral sesuai pandangan umum masyarakat;
- 6) Simbol-simbol kepemimpinan resmi yang telah ditetapkan oleh adat istiadat masyarakat;
- 7) Kemampuan dalam menggunakan kekuatan fisik yang nyata.

Unsur-unsur dan karakter kepemimpinan itu akan lebih jelas dengan melihat Diagram 1 di bawah ini.

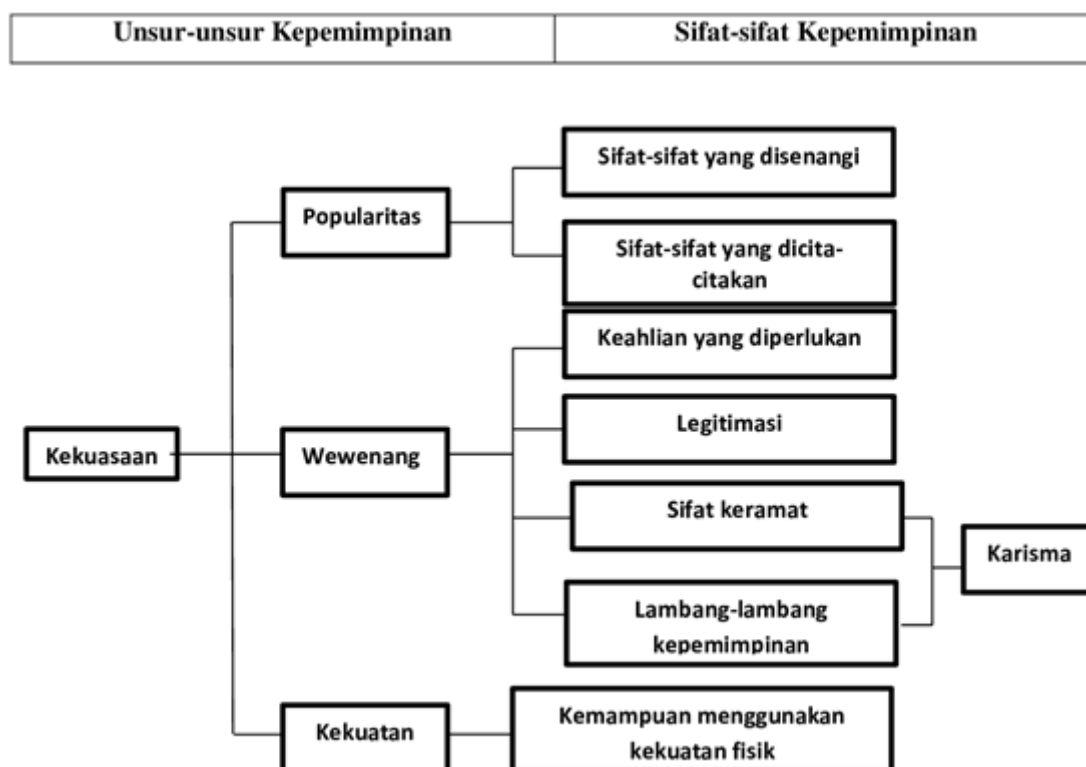


Diagram 1: Unsur-unsur kepemimpinan dan sifat pemimpin

Sumber : Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 1980, p. 195)

Diagram 1 di atas dengan jelas menunjukkan bahwa karisma itu merupakan gabungan dari setidaknya dua karakter kepemimpinan yang melekat pada unsur kewenangan dari kepemimpinan, yaitu sifat keramat dan penggunaan lambang-lambang kepemimpinan. Sifat keramat sebagaimana disebutkan di atas secara khusus ditandai dengan, utamanya anggapan adanya perolehan wahyu, *pulung* atau *wangsit*, baik itu berasal dari yang disebut sebagai leluhur, dewa, ataupun Tuhan. Seseorang yang memperoleh wahyu ini akan memiliki wewenang dan kekuasaan yang lebih kuat ketika ia juga sekaligus memiliki lambing-lambang

kepemimpinan. Dalam kultur tradisional Jawa lambang-lambang itu bisa berwujud mahkota, singgasana (bahasa Jawa: *dhampar kencana*), pusaka, pakaian kebesaran, dan sebagainya. Mulder (1994, p. 63) menambahkan, bahkan untuk lebih meningkatkan legitimasi dan kekuasaan, wahyu dan simbol kepemimpinan tersebut masih dilindungi lagi oleh apa yang disebut dengan *kasekten* (kesaktian). Konsep *kasekten* ini dalam paham tradisional Jawa merupakan inti kekuasaan. *Kasekten* dimaknai sebagai kekuatan supernatural dengan menggunakan *jimat* (*charms*), berkah (*blessing*), dan lain-lain untuk memberkati para pendekar pencak silat dan teknik bela diri asli dengan sifat kekebalan dan tak terkalahkan (Slamet-Velsink, 1004, p. 39). Secara lebih luas, *kasekten* itu terpancarkan keluar dari sang raja yang oleh masyarakat diyakini sebagai mendapatkan *teja*, *wahyu*, *pulung*, *ndaru*, atau apa pun istilahnya, yang diperoleh melalui *laku tapa brata*, *prihatin*, dan *tirakat*. Dengan memiliki semua itu, maka seluruh atribut kekuasaan akan melekat pada dirinya. Ucapan-ucapannya dianggap sebagai kebenaran, dan karena itu tidak boleh dibantah (lihat juga Thohari, 2018). Lebih lanjut Barowi (2017) menambahkan bahwa pemimpin dengan karakteristik seperti itu oleh pengikutnya diyakini sebagai *pandita-ratu* atau *ratu pinandita*, yaitu seseorang yang di dalam dirinya tertanam keterpaduan kualitas raja sekaligus pandita yang setiap sabdanya tidak bisa salah atau dipersalahkan. Falsafah Jawa menyebutnya sebagai *sabda pandita ratu datan kena wola-wali*.

Dalam konsep kekuasaan Jawa, Anderson (1984, p. 121), karisma dalam pengertian Jawa tradisional ini sangatlah sulit dipahami, karena sangat berbeda dan berada di luar jenis dan sumber-sumber kekuasaan yang lazim dikenal selama ini. Sampai-sampai Anderson mengatakan, apa kiranya jenis (karisma dalam kekuasaan Jawa) itu sama sekali tidaklah jelas. Namun dewasa ini, anggapan yang umum adalah bahwa karisma tergantung pada siapa yang melihatnya. Dengan kata lain karisma bukanlah suatu sifat yang benar-benar ada dalam diri seorang pemimpin, melainkan lebih berupa sifat yang diyakini pengikutnya tertanam pada diri pemimpin tersebut. Pemimpin dipandang sebagai manusia *linuwih* yang memiliki kemampuan luar biasa, dan seringkali dipandang sebagai tokoh yang mengemban amanah sejarah. Ia juga diyakini telah mendapat berkah Tuhan, dan oleh karenanya memiliki *kewaskitaan* dan kemampuan supranatural yang luar biasa. Pada gilirannya, pemimpin demikian ini dipandang sebagai pusat pancaran kekuasaan, dan mereka yang meyakini akan lebih melekatkan pada kekuasaan tersebut daripada patuh kepada si pemimpin tersebut seperti halnya kepatuhan yang diberikan masyarakat kepada pemegang kekuasaan rasional-legal (Siswanto, 2010). Hal ini jelas ditunjukkan oleh Anderson yang mencoba menarik perbedaan dengan konsep karisma yang digambarkan oleh Max Weber. Weber menjadikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik sebagai pusat perhatiannya, sebagai penyebab para pemimpin karismatik itu muncul, serta kepada kepribadian para pemimpin tersebut, dan bukan pada kebudayaan para pengikutnya (Anderson, 1984, p. 122).

Hampir sama dengan apa yang dikemukakan Max Weber, dalam penelitiannya di Eropa Eatwell (2006) menemukan bahwa sebuah model karisma perlu mempertimbangkan dengan lebih cermat ikatannya dengan pendukung serta sifat-sifat pemimpin yang spesifik, dan perlu

juga memikirkan teori mengapa kepribadian karismatik bisa jadi menarik. Berangkat dari hal ini kemudian Eatwell menyoroti empat pendekatan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, krisis (sosio-ekonomi), bahwa sebagian besar studi tentang karisma sejak Weber melihat beberapa bentuk krisis struktural sebagai titik awal yang diperlukan, dimana krisis ini lebih bersifat 'situasional' dan bukan krisis individual. Kedua, legitimasi (kultural) bahwa munculnya pemimpin karismatik memerlukan suatu bentuk legitimasi sejarah-budaya (sebuah pendekatan yang menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana otoritas karismatik dapat dipisahkan dari otoritas tradisional). Ketiga, fasilitasi (politik), bahwa munculnya Hitler sebagai pemimpin karismatik tidak lepas dari perkembangan organisasi Partai Nazi. Ini memberikan pelajaran bahwa kediktatoran itu memerlukan suatu bentuk partai untuk mengorganisir dukungan dan melakukan peran lain, seperti merekrut personel-personil kunci. Keempat, personality (*psychological*), yakni upaya yang dilakukan untuk menjelaskan daya tarik para pemimpin fasis melalui pendekatan psikologis (serta mencoba menjelaskan psikologi para karismatik itu sendiri).

Dalam konsep kekuasaan Jawa, rakyat sebagai pegikut pemimpin karismatik disebut *domas*, *wong bodo nanging atine emas* (orang bodoh tapi berhati mulia). Maka wajar jika pada akhirnya timbul penilaian bahwa melakukan kritik kepada pemimpin yang memosisikan diri sebagai "sang raja" yang telah diyakini memiliki karisma dan kesaktian, apalagi berani membantahnya, akan dianggap sebagai suatu tindakan pembangkangan (*mbalelo*) yang dalam bahasa pesantren dikenal dengan istilah *bughot*, dan dipandang layak untuk diberi sanksi berat. Karisma merupakan penguasaan seorang pemimpin dalam ilmu gaib atau segala sesuatu yang memiliki sifat sakral sebagai sarana memperbesar pengaruh sehingga legitimasinya sebagai pemimpin diakui dan diterima sepenuh jiwa (Anderson, 1984, pp. 100–106). Karisma, seperti halnya otoritas tradisional dalam konsep Weber, kekuasaannya datang dari kemampuan unggul seseorang, bukan dari bawaan dan tradisi. Karena otoritas ini berasal dari infrastruktur sosiologis, maka sumber kedaulatan adalah perilaku, sikap, dan keyakinan pribadi pemimpin. Semua ini berkat kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya, karenanya hal ini tidak terbuka terhadap kritik dan harus diterima apa adanya (Yilmaz & Telsaç, 2021). Breuilly (2011), berpendapat bahwa fenomena karisma demikian ini sebagian memungkinkan kita untuk memahami ciri-ciri kepemimpinan gerakan nasionalis dan fasis colonial. Karisma para pemimpin jenis ini justru jauh meningkat setelah kematian mereka (van Dick et al., 2019). Dalam konteks Indonesia masa kini, kita selalu bisa menyaksikan bagaimana foto Soekarno, Soeharto, Abdurrachman Wahid, Kyai Maimun Zubair, misalnya, senantiasa sengaja dipasang bersamaan dengan foto para calon anggota legislatif dalam baliho atau poster kampanye pemilihan umum dengan harapan dapat mendongkrak perolehan dukungan. Demikian juga dengan figur-figur pemimpin yang sampai saat ini masih hidup seperti Megawati, Susilo Bambang Yudoyono, dan Joko Widodo, juga dicoba dimanfaatkan karismanya oleh para calon anggota legislatif dan calon kepala daerah.

Kecenderungan Kepemimpinan Pasca Reformasi

Problem kepemimpinan masa transisi demokrasi dewasa ini bukan semata-mata kesalahan pengelolaan proses rekrutmen dan seleksi kepemimpinan pasca reformasi. Tetapi diakui atau tidak ia merupakan kelanjutan dan warisan kultur dan struktur politik era orde baru (Yunas, 2016). Termasuk di dalamnya kultur dan struktur di organisasi partai politik. Uniknya, tokoh-tokoh elit partai politik, terutama mereka yang duduk sebagai pucuk pimpinan seperti ketua umum, sudah dianggap lazim bila memiliki kekuasaan yang dominan melalui pengembangan kewibawaan bercorak karismatis. Terlebih lagi, seringkali para elit itu berperilaku layaknya seorang raja: yang memerintah dengan dekrit (*rule by decree*), menuntut kepatuhan mutlak, dan menginginkan kesetiaan penuh dari para pengikut dan pendukungnya. Mereka hendak menampilkan diri sebagai sosok yang mempunyai pesona ke-*agungbinatara*-an yang tanpa tandingan. Dimana ucapan-ucapannya adalah sabda, sabdanya menjadi titah, titahnya menjadi ajaran, perilakunya menjadi *idolatry*, dan yang tidak kalah penting pidato-pidatonya menjadi haluan politik. Bagi para pengikut dan pengagumnya para pemimpin demikian ini akan diakui dan diperlakukan layaknya titisan dewa yang sarat dengan aura karisma (Budiatri et al., 2018; Murtiana, 2017; Thohari, 2020).

Masalah dan isu-isu politik pemerintahan yang dalam konstitusi, baik Undang Undang Dasar maupun berbagai aturan turunan lainnya yang sejatinya sudah jelas menjadi kompleks masalahnya, ketika dipertemukan dengan suatu kepemimpinan publik yang mempunyai karisma besar di kalangan para pendukungnya. Pada masyarakat dengan warna relasi karismatis antara pemimpin dan kelompok pengikut demikian ini, pemikiran dan sikap kritis tidak akan terjadi. Karena hakekatnya kepemimpinan karismatis itu memang anti demokrasi (Willner, 1984). Bahkan Eatwell (2006) dalam studinya tentang kepemimpinan di Eropa diantara dua perang dunia menyebutkan bahwa kepemimpinan karismatik sejatinya merupakan tipe kepemimpinan diktator (*dictators*) yang meliputi kepemimpinan radikal fasis (*fasist radicals*) dan otoritarian konserfatif (*conservative authoritarians*). Karena itulah dalam kepemimpinan karismatik yang kuat, kritik dan *check and balances* yang dilakukan DPR, pers, ataupun kelompok masyarakat sipil (*civil society*) akan direspon dan disikapi secara emosional dan apriori. Kritik dan kontrol dipandang sebagai tindakan sengaja yang berniat menggerogoti kewibawaan sang pemimpin, bahkan juga kemungkinan untuk menjatuhkannya.

Pembelaan kepada sang pemimpin diekspresikan melalui tindakan-tindakan yang amat primordial dan komunal selayaknya yang berlaku pada masyarakat tradisional dan primitif. Karena bercorak fasis, tindakan-tindakan tanpa memedulikan nilai etika dan moral, yakni tindakan berupa teror, intimidasi, perusakan, pembakaran, dan tindak kekerasan lainnya, serta penyebaran fitnah dan pembohongan publik yang sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Apa yang dikemukakan (Solahudin, 2001) memberikan gambaran dengan sangat jelas bahwa berkembangnya kepemimpinan karismatis itu merupakan fenomena negatif, terlebih lagi apabila disertai dengan spirit komunal yang fasis. Dinamika struktural dan kultural relasi pemimpin-pengikut (*patron-klien*) demikian ini mengakibatkan kontrol, apalagi kritisisme tidak mungkin bisa terjadi.

Dalam demokrasi modern, terdapat tuntutan yang sangat kuat yang mengharuskan pejabat-pejabat publik secara terus menerus dikontrol untuk memastikan adanya responsibilitas, akuntabilitas, dan transparansi (Prianto, 2016). Lebih dari itu, tuntutan akan adanya kontrol yang kuat terhadap kepemimpinan publik tetapi juga selaras dengan adagium tentang kekuasaan sebagaimana dikemukakan seorang filsuf Inggris Lord Acton, bahwa “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” (Sanusi, 2009).

Nilai utama dalam demokrasi modern adalah bahwa kekuasaan itu milik publik, oleh karenanya harus ada akuntabilitas publik secara transparan. Selain pengikut tentu terdapat juga sebagian masyarakat yang menentang dan anti terhadap pejabat politik karismatik yang tengah memegang kekuasaan. Dalam sistem politik terbuka atau bahkan semi terbuka, status dan sumber daya mereka yang menentang pejabat politik karismatik atau kebijakannya ini dapat membatasi jangkauan kontribusi karismatik (Willner, 1984). Dari sudut pandang ini, para pemimpin yang dalam dirinya melekat aura kharismatik ketika memangku jabatan publik seperti presiden, wakil presiden, ketua partai politik, ketua atau anggota DPR, dan jabatan publik lainnya sudah seharusnya melakukan demistifikasi dengan menanggalkan aura karismanya yang bersifat keramat (mistis) dan lebih mengedepankan lambang-lambang kepemimpinan modern yang dalam terminologi Weber disebut dengan rasional legal.

Perlunya demistifikasi menuju nalar demokratis

Menurut Kamus Britannica demistifikasi diartikan untuk membuat (sesuatu) menjadi jelas dan mudah dimengerti; untuk menjelaskan (sesuatu) sehingga tidak lagi menjadikan salah tafsir atau membingungkan seseorang (*The Britannica Dictionary*, n.d.). Sedangkan dalam kamus Vocabulary demistifikasi dimaknai sebagai membuat kurang misterius atau menghilangkan misteri dari sesuatu (*Vocabulary*, n.d.). *Webster's New World College Dictionary* (The Editors of the Webster's New World Dictionaries, 2004) juga memberikan arti yang mirip bahwa demistifikasi bermakna untuk menghilangkan misteri atau mistik dari; membuat menjadi rasional atau dapat dipahami. Otoritas karismatik didasarkan pada tindakan pengabdian pribadi yang spesifik secara situasional. Dalam keadaan seperti ini, otoritas diberikan kepada individu tertentu yang dianggap oleh pengikutnya yang setia menunjukkan karakteristik yang luar biasa, sakral, dan/atau heroik. Oleh karena itu, otoritas karismatik terbatas pada lingkungan dan waktu tertentu (Borgatta & Montgomery, 2000).

Otoritas karisma yang melekat pada diri Soekarno adalah berkat peran sentralnya sebagai sosok pemuda berjiwa revolusioner di tengah medan pergerakan politik melawan penjajahan yang eksploitatif dan menindas, dan pada akhirnya memproklamkan Indonesia Merdeka bersama Mohammad Hatta. Soeharto tercatat dalam buku sejarah berkat kepemimpinan karismatiknya yang fokus pada pembangunan di berbagai bidang, khususnya ekonomi. Dan karena itu kemudian mendapat gelar kehormatan sebagai Bapak Pembangunan. Sedangkan otoritas karismatik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terletak pada perjuangannya dalam menanamkan nilai-nilai humanisme, egalitarianisme, dan toleransi yang sarat dengan muatan ikatan cinta dan kasih sayang bagi sesama anak bangsa. Itulah sebabnya kemudian Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme.

Kekuatan karismatik yang melekat pada Megawati terletak pada kegigihannya bertahan dalam meneruskankan dan mewujudkan cita-cita Soekarno di tengah serangan besar-besaran terhadap diri pribadi dan partainya sejak masa Soeharto (Mustafa, 2011). Sedangkan kewibawaan Susilo Bambang Yudoyono tercermin dari kesopanan dan kehati-hatian dalam memilih ucapan, sikap dan perilakunya yang tenang, serta kariernya yang sukses saat dua kali terpilih menjadi Presiden melalui pemilihan umum secara langsung.

Tidak dapat disangkal bahwa mereka adalah sosok-sosok karismatik, setidaknya bagi pengikut dan pendukungnya. Berdasarkan perjalanan perjuangan tersebut kemudian di masyarakat terbangun citra Soekarno sebagai Proklamator Kemerdekaan, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, Abdurrachman Wahid sebagai Bapak Pluralisme, dan sebagainya. Yang melekat pada diri sosok-sosok tersebut adalah wujud kharisma yang murni (*genuine charisma*), sehingga citra dan ajarannya menjadi pijakan utama para pengikutnya dalam membangun pola relasional yang dinamis. Aspek lain dari kewenangan karismatik adalah ketika pemimpin mampu menuntaskan berbagai permasalahan dengan gaya kinerja yang menarik perhatian kelompok-kelompok masyarakat yang berada di sekitarnya. Gaya kinerja yang salah satunya melalui blusukan telah menjadi ciri khas yang melekat pada diri Joko Widodo sejak menjabat Wali Kota Solo, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hingga menjabat sebagai presiden menjadi bukti bahwa Joko Widodo secara ralitas merupakan figur yang lebih dekat dengan rakyat. Demikian juga dengan kesederhanaan yang dimiliki beserta keluarganya juga menjadi sumber lain dari otoritas karismatik dan diakui memilikipengaruh besar dalam membangun dan menjalankan tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip *good, clean, and transparency governance* (Arrifai, 2021).

Terkait dengan kepemimpinan karismatik demikian ini, sudah selayaknya partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang sekaligus berperan sebagai tulang punggung kekuatan masyarakat dalam berhubungan dengan Negara menyelenggarakan proses demokratisasi (Kadir, 2014). Secara internal proses demokratisasi itu menyangkut baik struktur organisasi maupun kepemimpinan, dan secara eksternal berupa edukasi demokrasi bagi para pengikut dan pendukungnya (Hermawan, 2020). Saat ini sudah bukan jamannya lagi partai politik masih tetap mempertahankan gaya kepemimpinan karismatik yang cenderung oligarkis-sentralistis (Mustafa, 2011). Di era transisi menuju demokrasi ini adalah merupakan sesuatu yang *absurd* ketika masih terdapat partai politik yang tetap memberikan pendidikan politik kepada pendukungnya agar tidak mentoleransi adanya kritik yang diarahkan kepada organisasi dan kepemimpinannya. Yang lebih memprihatinkan lagi ketika pendidikan politik itu cenderung diarahkan kepada propaganda dan agitasi guna membakar emosi massa pendukung dan pengikutnya dengan memperalat karisma. Semestinya reformasi politik melahirkan pemimpin dan gaya kepemimpinan yang demokratis (Qori, 2013). Maka dalam hal ini, partai politik mengemban peran yang sangat krusial untuk berkomitmen dan secara konsisten menjalankan fungsi rekrutmen politik berdasarkan asas *merit system* yang didasarkan pada prestasi, dan bukan *spoiled system* atas dasar atribusi yang bermuatan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip kapabilitas, akseptabilitas, dan kredibilitas sudah seharusnya dijadikan

dasar penentuan kriteria rekrutmen politik. Oleh karena itu, rekrutmen politik mesti diselenggarakan secara transparan, *bottom-up*, dan berbasis *merit system*, dan tidak lagi didasarkan kepada budaya feodal, patriarki, primitif, komunal, dan patrimonial yang sejatinya merupakan karakteristik kepemimpinan karismatik (Ariyanto, 2016).

Pada masa transisi menuju demokrasi seperti yang terjadi saat ini, partai politik dalam kerangka merekrut pemimpin perlu merancang sistem dan prosedur baru yang benar-benar berbeda dengan model rekrutmen politik yang selama ini diterapkan (Qori, 2013). Rekrutmen kepemimpinan partai politik model lama yang menggunakan pola pengangkatan yang mengedepankan kewenangan karismatis berdasarkan silsilah, kepercayaan mistis, dan garis leluhur yang artifisial (Windisari & Wahyuliana, 2022) mesti digantikan dengan model rekrutmen baru yang menjamin adanya transparansi, rasional, dan demokratis (Prianto, 2011). Seperti dikemukakan dalam Diagram 1 di depan, bahwa kepemimpinan dan otoritas karismatis di dalamnya terkandung dua unsur, yakni sifat keramat (mistis) dan lambang-lambang kepemimpinan (modern), yang keduanya menjadi pengikat erat antara figur pemimpin dengan pengikutnya.

Munculnya pemimpin-pemimpin karismatis di panggung politik yang hanya mengandalkan sifat keramat dan aura mistis nyatanya kontra produktif jika dihadapkan dengan demokratisasi. Di dunia pesantren yang sarat dengan aura keramat ditemukan fakta bahwa, sering terjadi manakala kyai melibatkan diri dalam partai politik, secara perlahan jaraknya dengan umat semakin menjauh (Jannah, 2015). Tentu tidaklah terlalu salah dengan kepemimpinan karismatis dengan catatan kepemimpinan itu tetap menganut prinsip pengelolaan kekuasaan yang modern dan demokratis, dalam hal mana sistem yang dibangun harus memungkinkan munculnya sikap dan tindakan kritis masyarakat agar prinsip *check and balances* dapat berjalan. Namun jika kepemimpinan karismatis itu tetap disertai dengan primordialisme dan irasionalisme pendukungnya, tentu yang kemudian muncul adalah kabar buruk bagi keberhasilan transisi menuju demokrasi. Menurut Willner, A. R (1984) selain pengikut tentu terdapat juga sebagian masyarakat yang menentang pejabat politik karismatik. Dalam sistem politik yang terbuka atau bahkan semi terbuka, status dan sumber daya mereka yang menentang pejabat politik karismatik atau kebijakannya dapat membatasi jangkauan kontribusi karismatik. Pada hemat penulis, kelompok inilah yang semestinya terus didorong untuk melakukan demistifikasi otoritas karismatik dengan lebih mengedepankan corak karisma yang legal rasional.

Merupakan sebuah anakronisme ketika rakyat mendambakan demokrasi, namun pada saat yang bersamaan mereka tetap menganut dan menjalankan kultur dan organisasi kepartaian tradisional dengan tetap bergantung pada tokoh pemimpin karismatis yang beraura keramat (mistis), dengan sistem yang sentralistis, bahkan oligarkis (Windisari & Wahyuliana, 2022). Dua temuan penelitian Pappas, T. S. (2016) di sejumlah partai politik di Eropa menurut hemat penulis menguatkan anakronisme ini. Pertama, bahwa hubungan antara populisme dan kepemimpinan karismatik sampai saat ini dianggap lemah. Oleh karena itu, karisma pemimpin tidak lagi dianggap sebagai ciri penting populisme, sehingga memerlukan penyikapan yang

lebih hati-hati terhadap kasus-kasus empiris. Namun temuan kedua adalah, jika hubungan tersebut ada, kepemimpinan karismatik merupakan faktor penyebab penting bagi keberhasilan partai atau gerakan populis. Dengan demikian, menurut Pappas semakin kuat karisma kepemimpinannya, semakin tinggi kemungkinan partai populis untuk berhasil secara politik dan elektoral.

Pada akhirnya data seperti dikemukakan di depan meunculkan pertanyaan bagaimana tantangan baru mampu diatasi dengan menggunakan kebiasaan lama? Era baru dengan tantangan baru memerlukan respons baru, yaitu dengan demistifikasi karisma yang beraroma keramat dan mengedepankan karisma yang didasarkan pada lambang-lambang kepemimpinan modern yang lebih terbuka, realistis, dan legal rasional. Agar demistifikasi nalar dan realitas dapat dilakukan, maka dibutuhkan pola pikir dan sikap kritis yang kuat di kalangan masyarakat luas maupun pengikut dan pendukung partai politik, sehingga memungkinkan berkembangnya tradisi berpikir yang *a posteriori* (Amal, 2015).

Penutup

Pada kenyataannya, ketiga jenis kekuasaan, tradisional, karismatik, dan legitimasi-rasional, seperti dikemukakan Max Weber, sama sekali tidak dapat dipisahkan. Pada tingkat yang berbeda-beda, ketiga jenis kekuasaan yang diwujudkan dalam perilaku seseorang dan gaya kepemimpinan politiknya saling mempengaruhi. Kalau bicara tentang kepemimpinan kharismatik, seperti halnya para pemimpin politik di atas, yang menonjol tentu saja kharisma pribadi sang pemimpin, namun bukan berarti tidak memiliki nuansa tradisional, sistem, dan logika hukum. Kepemimpinan seseorang erat kaitannya dengan hubungan antara pemimpin dengan orang yang dipimpin atau diikuti. Di bawah kekuasaan pemimpin karismatik, loyalitas dan ketaatan bawahan sangat tinggi, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian orang yang tidak mengikuti atau bahkan menentang pemimpin karismatik. Dengan demikian, menurut penulis, untuk kepemimpinan politik demokratis di masa depan, kepemimpinan kharismatik masih tepat. Namun, ada satu hal penting yang harus dilakukan: di satu sisi, harus ada proses mengungkap kharisma yang melekat pada setiap pemimpin karismatik. Di sisi lain, kita harus terus mendorong konsolidasi sifat rasional-hukum tidak hanya demokrasi prosedural tetapi terutama nilai-nilai demokrasi substantif.

Daftar Pustaka

- Amal, M. K. (2015). Islam dan Nation-State: Memetakan kembali pergulatan ideologi kebangsaan Islam Indonesia. In A. Taufiq, A. F. Hadi, & A. Anwar (Eds.), *Reaktualisasi Pancasila: Menyoal identitas, globalisasi, dan diskursus negara-bangsa*. Ombak, Yogyakarta (pp. 350–372). Penerbit Ombak.
- Anderson, B. R. O. (1984). Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa. In M. Budiarjo (Ed.), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan: Vol. x. Sinar Harapan.

- Ariyanto, B. (2016). Desentralisasi Pengelolaan Partai Politik (Upaya Penataan Kelembagaan Partai Politik Menuju Partai Modern). In F. Amsari, C. Simabura, K. Fahmi, & M. N. Fajri (Eds.), *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA Ke-3 "DEMOKRATISASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA" Padang-Bukittinggi, 5-8 September 2016* (pp. 685–700). Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Arrifai, F. B. (2021, June 6). *Mengulas Secara Singkat Kepemimpinan Joko Widodo*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/fatimah-badri/mengulas-secara-singkat-kepemimpinan-joko-widodo-1vsAdOp9C0A>
- Barowi, A. (2017). Barowi, "SERAT PAMORING KAWULA GUSTI Perwujudan Islam Kejawen., *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2).
- Borgatta, E. F., & Montgomery, R. J. V. (2000). *Encyclopedia of Sociology* (2nd ed., Vol. 1). Macmillan Reference.
- BREUILLY, J. (2011). Max Weber, charisma and nationalist leadership1. *Nations and Nationalism*, 17(3), 477–499. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2011.00487.x>
- Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, Moch., Amalia, S., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2018). Personalisasi partai politik di Indonesia era reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2).
- Collin, P. H. (2004). *Dictionary of Politics and Government* (third). Bloomsbury.
- Vocabulary*. (n.d.). Vocabulary.Com. Retrieved August 16, 2023, from <https://www.vocabulary.com/dictionary/demystify>
- Eatwell, R. (2006). The Concept and Theory of Charismatic Leadership. *Totalitarian Movements and Political Religions*, 7(2), 141–156. <https://doi.org/10.1080/14690760600642156>
- Harwood, T. G., & Garry, T. (2003). An Overview of Content Analysis. *The Marketing Review*, 3(4), 479–498. <https://doi.org/10.1362/146934703771910080>
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. . . *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1).
- Jannah, H. (2015). Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan. *Fikrah*, 3(1).
- Kadir, A. G. (2014). Dinamika Partai Politik Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132–136.
- Koentjaraningrat. (1980). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. PT Dian Rakyat.
- McNabb, D. E. (2015). *Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315701127>
- Mills, C. W., & Horowitz, I. L. (1967). *Power, politics and people: The collected essays of C. Wright Mills*. Oxford University Press.
- Mulder, N. (1994). The Ideology of Javanese-Indonesian Leadership. In H. Antlöv & S. Cederroth (Eds.), *Leadership On Java, Gentle Hints, Authoritarian Rule*. Routledge.
- Murtiana, E. (2017). *Model Kepemimpinan Karismatik Susilo Bambang Yudhoyono dalam Partai Demokrat* [Bachelor Thesis]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Mustafa, H. (2011). *Kepemimpinan karismatik: studi tentang kepemimpinan politik Megawati Soekarno Putri dalam partai demokrasi Indonesia perjuangan* [Bachelor Thesis]. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Pappas, T. S. (2011). *Political Charisma Revisited, and Reclaimed for Political Science* (2011/60; EUI RSCAS).
- Pappas, T. S. (2016). Are Populist Leaders “Charismatic”? The Evidence from Europe. *Constellations*, 23(3), 378–390. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12233>
- Prianto, B. (2011). Rekrutmen Kepemimpinan Sektor Publik di Daerah: Problem Internal Partai Politik. *Kalamsiasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 155–172.
- Prianto, B. (2016). PARTAI POLITIK, FENOMENA DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN DESENTRALISASI. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.436>
- Qori, H. I. L. A. (2013). Kepemimpinan karismatik versus kepemimpinan transformasional. *Jurnal Analisa*, 1(2), 70–77.
- Ridoi, M. (2016). *Kekuatan figur dalam partai politik (studi terhadap Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa)* [Bachelor Thesis]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Rozaki, A. (2021). *Menabur Karisma, Menuai Kuasa*. IRCiSoD.
- Sanusi, H. A. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83–104.
- Shadily, H. (1992). *Ensiklopedi Indonesia* (H. Shadily, Ed.). Ihtiar Baru-Van Hove.
- Siswanto, D. (2010). Pengaruh pandangan hidup masyarakat Jawa terhadap model kepemimpinan (tinjauan filsafat sosial). *Jurnal Filsafat*, 20(3), 197–216.
- Slamet-Velsink. (1004). Traditional Leadership in Rural Java. In *Leadership On Java, Gentle Hints, Authoritarian Rule* (pp. 576–589). Curzon Press Ltd.
- Solahudin. (2001). *Amuk Massa Gus Dur: Laporan Kekerasan terhadap Jurnalis dan Media Massa Mei 2000-April 2001*. AJI Indonesia.
- The Britannica Dictionary*. (n.d.). Retrieved August 2, 2023, from <https://www.britannica.com/dictionary/demystify>
- The Editors of the Webster’s New World Dictionaries. (2004). *Webster’s New World College Dictionary* (fourth). Webster’s New World.
- Thohari, H. Y. (2018). *Sistem kekuasaan dan pemerintahan kuno; kajian aspek budaya*. . 10, 39–60.
- Thohari, H. Y. (2020, November 19). *Kepemimpinan Karismatis: Bukan Masa Depan*. Suara Muhammadiyah. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/11/19/kepemimpinan-karismatis-bukan-masa-depan/>
- van Dick, R., Fink, L., Steffens, N. K., Peters, K., & Haslam, S. A. (2019). Attributions of leaders’ charisma increase after their death: The mediating role of identity leadership and identity fusion. *Leadership*, 15(5), 576–589. <https://doi.org/10.1177/1742715018807042>

- WILLNER, A. R. (1984). *The Spellbinders*. Yale University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctt1ww3w19>
- Windisari, Y., & Wahyuliana, I. (2022). Tahta Extended Family Dalam Bias Politik Kekerabatan. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(1), 53–65.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.13089>
- YILMAZ, V., & TELSAC, C. (2021). AUTHORITY AND BUREAUCRACY FROM WEBER'S PERSPECTIVE. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 34, 42–52. <https://doi.org/10.20875/makusobed.903546>
- Yudi, L. (2010). *Indonesia Masih Kemarau Calon Pemimpin*. Inilah.Com.
- Yunas, N. S. (2016). Kepemimpinan Dan Masa Depan Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Dimensi Journal of Sociology*, 9(2), 103–114.